

ABSTRAK

Rifda NurNabilla (1228010182): Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata yang tidak diimbangi dengan sistem tata kelola yang terintegrasi telah menimbulkan akumulasi sampah dan menurunkan kualitas lingkungan pesisir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas kolaborasi antaraktor yang terlibat, meliputi pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, serta menguji secara empiris bagaimana lima indikator utama *Collaborative Governance* berkontribusi dalam mendukung pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kerangka berpikir Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang menekankan lima indikator utama, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust-building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Kelima indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kualitas proses kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah pesisir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan Pantai Pelabuhan Ratu. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika kolaborasi yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pesisir di Pantai Pelabuhan Ratu telah berjalan, namun belum optimal. Dialog antaraktor telah dilakukan secara rutin, tetapi belum terlembagakan secara formal. Kepercayaan dan komitmen kolaboratif sudah terbentuk, meskipun masih terdapat ketimpangan peran dan belum didukung oleh mekanisme evaluasi yang sistematis. Kesepahaman tujuan bersama mulai terbangun, namun partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program masih memerlukan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah pesisir sangat ditentukan oleh kualitas proses kolaboratif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Pesisir Pantai, Pelabuhanratu